

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan gender dalam program keluarga berencana masih belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan KB, dimana perempuan lebih banyak menggunakan KB dibandingkan dengan laki-laki. Peran laki-laki dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum optimal, sehingga laki-laki dan perempuan belum dapat berpartisipasi secara merata, serta belum mendapatkan manfaat yang sama dari pelayanan dan informasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kampung KB.
2. Hasil analisis menggunakan metode SEM-PLS memperlihatkan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pengarusutamaan gender. Indikator yang mewakili akses yaitu lokasi, ketersediaan alat kontrasepsi, serta sarana dan prasarana. Sedangkan Indikator yang mewakili partisipasi yaitu jenis pekerjaan, dialog antar masyarakat, dan pendapatan, Indikator yang mewakili kontrol yaitu kunjungan instansi terkait secara berkala, kunjungan berkala penyuluh lapangan KB, dan kontrol pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Sedangkan Indikator yang mewakili manfaat yaitu kesehatan meningkat, dan kesejahteraan meningkat.
3. Hasil SEM pada Indikator pengarusutamaan gender pada program keluarga berencana yaitu kebiasaan turun temurun, sosial budaya, agama, keluarga, dan keterbatasan opsi pilihan alat kontrasepsi bagi pria, sehingga terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kesetaraan gender dalam program KB di Kampung KB.

## B. SARAN

Sejumlah temuan dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini menghasilkan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap pasangan usia subur terutama mereka yang telah memiliki jumlah anak diatas tiga.
2. Pemerintah harus menyediakan pos pelayanan kesehatan disetiap kampung KB dengan tenaga ahli (dokter ahli) yang dapat mendukung masyarakat yang ingin memakai KB, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari dokter dan bidan swasta.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mengembangkan strategi yang efektif tentang informasi program bahwa KB itu juga merupakan tanggung jawab laki-laki bukan hanya perempuan saja.
4. Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengembangkan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang responsif gender, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena perencanaan dan pelaksanaan programnya telah mampu memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang.